



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SYA'RAWI
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 847812

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.250.000.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/110 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **218.000.000**

1. MOTOR, SUSUKI SPIN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, NISSAN XTRAIL Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



4. MOTOR, KEEWAY KP250TC M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 55.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI KLX TRAIL Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
6. MOTOR, YAMAHA FILANO MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	287.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	185.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	60.000.000
Sub Total	Rp.	2.000.000.000
III. HUTANG	Rp.	226.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.774.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.